



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 050.2.5/7707/2018  
050.2.5/994/2018**  
**TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
2018**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 050.2.5/7707/2018**  
**050.2.5/994/2018**  
**TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018**

**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT**  
Jabatan : Bupati Kudus  
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **ACHMAD YUSUF RONI**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama : **Drs. H. ILWANI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

c. Nama : **AGUS WARIONO**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

d. Nama : **DEDHY PRAYOGO, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Kudus, 5 September 2018

**BUPATI KUDUS**

**selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

**selaku,  
PIHAK KEDUA**

**( ACHMAD YUSUF RONI )  
KETUA**

**( Drs. H. ILWANI )  
WAKIL KETUA**

**( AGUS WARIONO )  
WAKIL KETUA**

**( DEDHY PRAYOGO, SE )  
WAKIL KETUA**



# **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>4</b>
<b>BAB III</b>	<b>PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>15</b>
4.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	15
4.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	26
4.3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	28
	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	35
	- Dinas Kesehatan	40
	- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	47
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48
	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	55
	- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	58
	- Satuan Polisi Pamong Praja	60
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	63
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66
	- Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	68
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	74
	- Dinas Perhubungan	77
	- Dinas Komunikasi Dan Informatika	80
	- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	86
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90
	- Dinas Pertanian Dan Pangan	92
	- Dinas Perdagangan	97
	- Sekretariat Daerah :	
	- Bagian Tata Pemerintahan	100
	- Bagian Hukum	101
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	103
	- Bagian Perlengkapan dan Keuangan	104
	- Bagian Organisasi	106
	- Bagian Umum	108
	- Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	110

- Bagian Pengadaan Barang/Jasa	111
- Sekretariat DPRD	112
- Kecamatan Kaliwungu	114
- Kecamatan Kota	116
- Kelurahan Purwosari	119
Kelurahan Sunggingan	121
Kelurahan Panjunan	123
Kelurahan Wergu Wetan	125
Kelurahan Wergu Kulon	126
Kelurahan Mlati Kidul	128
Kelurahan Mlatinorowito	130
Kelurahan Kerjasan	132
Kelurahan Kajeksan	134
- Kecamatan Jati	136
- Kecamatan Undaan	138
- Kecamatan Mejobo	140
- Kecamatan Jekulo	142
- Kecamatan Bae	144
- Kecamatan Gebog	146
- Kecamatan Dawe	149
- Inspektorat Daerah	151
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	153
- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	156
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	160
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga	161
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>163</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>164</b>

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor      Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019, maka perlu disusun PPAS Tahun Anggaran 2019.

**1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah yang akan melaksanakan, program yang prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 07/2015 tentang Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.

**BAB II**  
**RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**Tabel 2.1**  
**Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019**

Nomor Urut	PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.677.217.296.000</b>	
1.1	<b>Pendapatan asli daerah</b>	318.459.254.000	
1.1.1	Pajak daerah	105.384.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB</li> <li>2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</li> <li>3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel</li> <li>4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.</li> <li>5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.</li> <li>6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.</li> <li>7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan logam dan batuan.</li> <li>8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.</li> <li>9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.</li> <li>10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)</li> <li>11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet</li> </ol>

<b>Nomor Urut</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.1.2	Retribusi daerah	31.484.115.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</li> <li>3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal</li> <li>4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir</li> <li>5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum</li> <li>6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.</li> <li>8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</li> <li>9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</li> <li>10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</li> <li>11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus</li> <li>12. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</li> <li>13. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar</li> <li>14. Perda Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> </ol>

<b>Nomor Urut</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			15. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
			16. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
			17. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Gangguan
			18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.118.227.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus</li> <li>2. Peraturan Gubernur Jateng No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng No. 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jateng</li> <li>3. Perda Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2014 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus</li> </ol>
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	174.472.912.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.</li> <li>2. Peraturan Bupati Kudus No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Kudus.</li> <li>3. Perda Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.</li> <li>4. Keputusan Bupati No. 440/244/2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.</li> </ol>

<b>Nomor Urut</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.086.302.066.000</b>	
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	278.590.893.000	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-4245/WPB.14/2017
1.2.2	Dana alokasi umum	807.711.173.000	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-4245/WPB.14/2017
1.2.3	Dana alokasi khusus	-	
1.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>272.455.976.000</b>	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	1. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019
1.3.2	Dana darurat	-	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	128.239.932.000	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	144.216.044.000	1. Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Surat Kemenkeu RI Nomor S-4245/WPB.14/2017
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.677.217.296.000</b>	

**BAB III**  
**PRIORITAS BELANJA DAERAH**

**Tabel 3.1**  
**Matriks Prioritas Pembangunan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Disdikpora	Program Pendidikan Non Formal
		b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.	Disdikpora	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Disdikpora	Program Pendidikan Non Formal
2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
				Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
			RSUD Dr. Loekmonohadi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
				Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
		b) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Dinas SosP3AP2KB	Program Keluarga Berencana
3	Penguatan ekonomi kerakyatan	a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.	Dinas NakerinkopUKM	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
		b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM	Dinas NakerinkopUKM	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
		c) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif.	DPMPTSP	Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
				Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
				Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha
		d) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata	Dinas Budpar	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
		e) Pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas NakerinkopUKM	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
		f) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan	Dinas Perdagangan	Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
				Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
				Program Pembinaan PKL dan asongan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		g) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan
				Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan
				Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan
		h) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.	Dinas Pertanian dan Pangan	Program peningkatan ketahanan pangan
4	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	a) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.	Disdikpora	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
			RSUD Dr. Loekmonohadi	Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
		c) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Dinas SosP3AP2KB	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
		d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan	Dinas PMD	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
				Program fasilitasi pemerintahan desa
		e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.	Dinas Budpar	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
		f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Dinas Dikpora	Program Kepemudaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		g) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.	Dinas NakerinkopUKM	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
				Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan
5	Peningkatan kualitas infrastruktur	a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata	Dinas PUPR	Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan
				Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
				Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ
				Program Peningkatan Pengelola Perpustakaan dan Terminal
		b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.	Dinas PUPR	Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Dinas PKPLH	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Dinas PKPLH	Program pengendalian dan konservasi LH
				Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
				Program pengelolaan taman hutan raya
		e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.	Dinas PUPR	Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
		g) Peningkatan pengelolaan pertanahan	Dinas PUPR	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
6	Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Bappelitbangda	Program perencanaan pembangunan daerah
				Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya
				Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam
		b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.	BKPP	Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur
				Program penyelenggaraan administrasi aparatur
				Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur
		c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.	Inspektorat	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
				Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
		d) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah	Bagian Umum	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		e) Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Sekretariat DPRD	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		f) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD	Program peningkatan pendapatan daerah
				Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah
				Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah
				Program pengelolaan perbendaharaan daerah
				Program pengelolaan aset daerah
		g) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Dinas Dukcapil	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
		h) Peningkatan supremasi hukum di daerah.	Bagian Hukum	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
		i) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Dinas Kominfo	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik
				Program pengembangan teknologi dan sistem informasi
		j) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	Program fasilitasi tata pemerintahan
		k) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Kantor Kesbangpol	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
		l) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana	BPBD	Program Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Perangkat Daerah yang Melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
		m) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan
				Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan
		n) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.	Bagian Kesra	Program peningkatan kesejahteraan rakyat

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**4.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat**

Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**  
**dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar					
a	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu	855.000.000	1.000.000.000	1.855.000.000
		Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu	800.000.000	983.280.000	1.783.280.000
		Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	2.469.097.000	3.000.000.000	5.469.097.000
			Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi		186.000.000	186.000.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	b Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kab. Kudus	13.902.247.000	200.000.000	14.102.247.000
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		9.223.600.000		9.223.600.000
		Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		117.103.281.000		117.103.281.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		13.000.000.000		13.000.000.000
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		10.685.063.000		10.685.063.000
		Program Pelayanan Kesehatan BLUD		163.124.912.000		163.124.912.000
	c Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Hibah Kepada Kementerian Agama Kab. Kudus untuk Tambahan Kesejahteraan Guru TPQ, Madin dan Diakonia	122.073.205.000	61.560.000.000	183.633.205.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program Pendidikan Non Formal	Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi	3.483.000.000	1.231.000.000	4.714.000.000
			Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta		1.641.120.000	1.641.120.000
			Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)		13.456.800.000	13.456.800.000
			Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta		20.760.000.000	20.760.000.000
			Hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan GTT dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta		20.952.000.000	20.952.000.000
			Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat		1.230.000.000	1.230.000.000
	d Peningkatan Akses Perumahan dan Permukiman Layak	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		45.176.817.000		45.176.817.000
	e Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk		5.199.853.000		5.199.853.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil		855.532.000		855.532.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		1.957.823.000		1.957.823.000
2	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman					
	a Peningkatan konektivitas dan TIK	Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		184.795.000.000		184.795.000.000
		Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		856.500.000		856.500.000
		Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ		1.985.200.000		1.985.200.000
		Program Peningkatan Pengelola Perpustakaan dan Terminal		187.500.000		187.500.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		34.217.874.000		34.217.874.000
	b Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat					
	c Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat		4.110.940.000		4.110.940.000
		Program fasilitasi pemerintahan desa		1.514.320.000		1.514.320.000
	d Penanggulangan Dampak Bencana	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		1.581.130.000		1.581.130.000
		Program Penanggulangan Bencana Daerah		1.276.000.000		1.276.000.000
	e Peningkatan Sistem Logistik	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar		16.300.000.000		16.300.000.000
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Lainnya					
	a Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian					
	b Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Program peningkatan dan pengembangan perindustrian		3.025.000.000		3.025.000.000
		Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal		724.500.000		724.500.000
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		135.000.000		135.000.000
		Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan		328.920.000		328.920.000
		Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha		30.000.000		30.000.000
	c Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah		1.200.000.000		1.200.000.000
		Program pengembangan dan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya		1.870.000.000		1.870.000.000
		Program peningkatan dan pengembangan pariwisata		2.760.000.000		2.760.000.000
		Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen		680.000.000		680.000.000
		Program Pembinaan PKL dan asongan		285.000.000		285.000.000
	d Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada Wira Usaha	6.305.000.000	3.000.000.000	9.305.000.000
		Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan		350.000.000		350.000.000
	e Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		625.000.000		625.000.000
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	a	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi				
	b	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	2.560.000.000		2.560.000.000
			Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	345.000.000		345.000.000
			Program peningkatan ketahanan pangan	910.000.000		910.000.000
			Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	1.132.000.000		1.132.000.000
	c	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	18.405.068.000	880.000.000	19.285.068.000
			Hibah Rehabilitasi Sarpras Pamsimas		161.000.000	161.000.000
	d	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	Program pengendalian dan konservasi LH	1.040.000.000		1.040.000.000
			Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH	2.715.250.000		2.715.250.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		16.887.800.000		16.887.800.000
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu					
	a Kamtibmas dan Keamanan Siber	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		3.891.632.000		3.891.632.000
		Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik		2.730.973.000		2.730.973.000
		Program pengembangan teknologi dan sistem informasi		712.515.000		712.515.000
	b Kesuksesan Pemilihan Umum	Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Hibah Pengamanan Pemilu	574.860.000	2.500.000.000	3.074.860.000
	c Pertahanan Wilayah Nasional					
	d Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum		488.120.000		488.120.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=5+6
		Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM		901.500.000		901.500.000
		Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		735.000.000		735.000.000
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		2.482.345.000		2.482.345.000
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		200.000.000		200.000.000
e	Efektivitas Diplomasi					
		<b>JUMLAH</b>		<b>831.764.377.000</b>	<b>132.741.200.000</b>	<b>964.505.577.000</b>

#### 4.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi dituangkan dalam tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi**

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
1	Penanggulangan kemiskinan			
	a. Koperasi dan UKM	1.200.000.000	3.000.000.000	4.200.000.000
	b. Sosial	2.931.000.000	11.203.016.000	14.134.016.000
	c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.625.260.000	13.686.812.000	19.312.072.000
	d. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		221.376.837.000	221.376.837.000
2	Penguatan daya saing ekonomi daerah			
	a. Penanaman Modal	1.218.420.000		1.218.420.000
	b. Pariwisata	2.760.000.000		2.760.000.000
	c. Perdagangan	17.265.000.000		17.265.000.000
	d. Perindustrian	3.025.000.000		3.025.000.000
	e. Tenaga Kerja	6.655.000.000		6.655.000.000
3	Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM)			
	a. Pendidikan	125.556.205.000	121.130.920.000	246.687.125.000
	b. Kesehatan	327.039.103.000	300.000.000	327.339.103.000
	c. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	8.013.208.000		8.013.208.000
	d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.704.490.000		5.704.490.000
	e. Kepemudaan dan Olahraga	3.099.075.000	4.000.000.000	7.099.075.000

No	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
	f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.205.000.000		2.205.000.000
	g. Kebudayaan	1.870.000.000		1.870.000.000
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana			
	a. Lingkungan Hidup	20.643.050.000		20.643.050.000
5	Ketahanan Pangan dan Energi			
	a. Pangan	910.000.000		910.000.000
	b. Pertanian	2.905.000.000		2.905.000.000
	c. Kelautan dan Perikanan	1.132.000.000		1.132.000.000
6	Kesenjangan wilayah			
	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	238.872.942.000		238.872.942.000
	b. Perumahan dan Permukiman	45.176.817.000	1.991.000.000	47.167.817.000
	c. Perhubungan	3.029.200.000		3.029.200.000
	d. Pertanahan	22.968.600.000		22.968.600.000
	e. Energi dan Sumber Daya Mineral	15.000.000		15.000.000
7	Tata kelola Pemerintahan			
	a. Fungsi Penunjang	42.692.235.000		42.692.235.000
	b. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.535.742.000	2.500.000.000	9.035.742.000
	c. Komunikasi dan Informatika	3.443.488.000		3.443.488.000
	d. Program Administrasi Perkantoran	92.513.527.000		92.513.527.000
	e. Statistik	121.000.000		121.000.000
	f. Persandian	20.000.000		20.000.000
	g. Perpustakaan	220.795.000		220.795.000
	h. Kearsipan	371.296.000		371.296.000
	JUMLAH	995.737.453.000	379.188.585.000	1.374.926.038.000

#### **4.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 berdasarkan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana dalam tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3.**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2019**

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	%
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
<b>1</b>				<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>495.301.046.000</b>	<b>463.190.293.000</b>	<b>958.491.339.000</b>	<b>56,23</b>
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Pendidikan</b>	<b>342.660.535.000</b>	<b>22.390.352.000</b>	<b>365.050.887.000</b>	<b>21,42</b>
1	1	1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	342.660.535.000	22.390.352.000	365.050.887.000	21,42
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Kesehatan</b>	<b>101.410.847.000</b>	<b>283.804.411.000</b>	<b>385.215.258.000</b>	<b>22,60</b>
1	2	1		Dinas Kesehatan	69.907.021.000	140.051.061.000	209.958.082.000	12,32
1	2	2		Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	31.503.826.000	143.753.350.000	175.257.176.000	10,28
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>13.319.567.000</b>	<b>89.850.641.000</b>	<b>103.170.208.000</b>	<b>6,05</b>
1	3	1		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.319.567.000	89.850.641.000	103.170.208.000	6,05
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>19.079.878.000</b>	<b>49.203.500.000</b>	<b>68.283.378.000</b>	<b>4,01</b>
1	4	1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	19.079.878.000	49.203.500.000	68.283.378.000	4,01
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.333.502.000</b>	<b>8.983.241.000</b>	<b>20.316.743.000</b>	<b>1,19</b>
1	5	1		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.258.528.000	786.921.000	3.045.449.000	0,18
1	5	2		Satuan Polisi Pamong Praja	9.074.974.000	8.196.320.000	17.271.294.000	1,01

KODE			URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	%
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1			2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Sosial</b>	<b>7.496.717.000</b>	<b>8.958.148.000</b>	<b>16.454.865.000</b>	<b>0,97</b>
1	6	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.729.161.000	7.004.000.000	12.733.161.000	0,75
	6	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.767.556.000	1.954.148.000	3.721.704.000	0,22
<b>2</b>			<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>45.543.276.000</b>	<b>50.443.806.000</b>	<b>95.987.082.000</b>	<b>5,63</b>
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Tenaga Kerja</b>	<b>8.175.828.000</b>	<b>12.061.150.000</b>	<b>20.236.978.000</b>	<b>1,19</b>
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8.175.828.000	12.061.150.000	20.236.978.000	1,19
<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>4.718.273.000</b>	<b>8.302.288.000</b>	<b>13.020.561.000</b>	<b>0,76</b>
2	10	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.718.273.000	8.302.288.000	13.020.561.000	0,76
<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>3.387.198.000</b>	<b>5.905.032.000</b>	<b>9.292.230.000</b>	<b>0,55</b>
2	7	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.387.198.000	5.905.032.000	9.292.230.000	0,55
<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Perhubungan</b>	<b>10.973.089.000</b>	<b>6.832.420.000</b>	<b>17.805.509.000</b>	<b>1,04</b>
2	9	1	Dinas Perhubungan	10.973.089.000	6.832.420.000	17.805.509.000	1,04
<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.497.482.000</b>	<b>5.429.803.000</b>	<b>8.927.285.000</b>	<b>0,52</b>
2	10	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.497.482.000	5.429.803.000	8.927.285.000	0,52

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	%
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>12</b>			<b>Penanaman Modal</b>	<b>4.830.267.000</b>	<b>1.910.180.000</b>	<b>6.740.447.000</b>	<b>0,40</b>
2	12	1		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.830.267.000	1.910.180.000	6.740.447.000	0,40
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>Kebudayaan</b>	<b>6.746.571.000</b>	<b>8.316.933.000</b>	<b>15.063.504.000</b>	<b>0,88</b>
2	16	1		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.746.571.000	8.316.933.000	15.063.504.000	0,88
<b>2</b>	<b>17</b>			<b>Perpustakaan</b>	<b>3.214.568.000</b>	<b>1.686.000.000</b>	<b>4.900.568.000</b>	<b>0,29</b>
2	17	1		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.214.568.000	1.686.000.000	4.900.568.000	0,29
<b>3</b>				<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>27.667.000.000</b>	<b>15.223.132.000</b>	<b>42.890.132.000</b>	<b>2,52</b>
<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Urusan Pertanian</b>	<b>12.073.264.000</b>	<b>5.926.632.000</b>	<b>17.999.896.000</b>	<b>1,06</b>
3	3	1		Dinas Pertanian Dan Pangan	12.073.264.000	5.926.632.000	17.999.896.000	1,06
<b>3</b>	<b>6</b>			<b>Perdagangan</b>	<b>15.593.736.000</b>	<b>9.296.500.000</b>	<b>24.890.236.000</b>	<b>1,46</b>
3	6	1		Dinas Perdagangan	15.593.736.000	9.296.500.000	24.890.236.000	1,46
<b>4</b>				<b>FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>517.084.254.000</b>	<b>90.175.559.000</b>	<b>607.259.813.000</b>	<b>35,62</b>
<b>4</b>	<b>1</b>			<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>92.247.714.000</b>	<b>69.848.753.000</b>	<b>162.096.467.000</b>	<b>9,51</b>
4	1	1		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.328.366.000	0	26.328.366.000	1,54
4	1	2		Bupati dan Wakil Bupati	828.643.000	0	828.643.000	0,05
4	1	3	1	Bagian Tata Pemerintahan	1.331.930.000	582.717.000	1.914.647.000	0,11
4	1	3	2	Bagian Hukum	1.922.042.000	1.042.102.000	2.964.144.000	0,17
4	1	3	3	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.295.118.000	362.916.000	1.658.034.000	0,10

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	%
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
4	1	3	4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.635.916.000	1.794.148.000	3.430.064.000	0,20
4	1	3	5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.550.320.000	2.704.865.000	4.255.185.000	0,25
4	1	3	6	Bagian Perlengkapan Dan Keuangan	1.535.672.000	12.588.623.000	14.124.295.000	0,83
4	1	3	7	Bagian Organisasi	1.883.735.000	1.167.304.000	3.051.039.000	0,18
4	1	3	8	Bagian Umum	7.746.846.000	10.954.019.000	18.700.865.000	1,10
4	1	4		Sekretariat DPRD	5.904.059.000	19.268.683.000	25.172.742.000	1,48
4	1	5		Kecamatan Kaliwungu	3.018.102.000	991.553.000	4.009.655.000	0,24
4	1	6		Kecamatan Kota	4.368.969.000	3.193.776.000	7.562.745.000	0,44
4	1	6	1	Kelurahan Purwosari	1.125.128.000	519.130.000	1.644.258.000	0,10
4	1	6	2	Kelurahan Sunggingan	1.041.862.000	438.500.000	1.480.362.000	0,09
4	1	6	3	Kelurahan Panjunan	1.303.591.000	465.329.000	1.768.920.000	0,10
4	1	6	4	Kelurahan Wergu Wetan	1.209.166.000	1.587.717.000	2.796.883.000	0,16
4	1	6	5	Kelurahan Wergu Kulon	1.280.697.000	401.209.000	1.681.906.000	0,10
4	1	6	6	Kelurahan Mlati Kidul	1.093.823.000	483.750.000	1.577.573.000	0,09
4	1	6	7	Kelurahan Mlati Norowito	1.010.044.000	374.677.000	1.384.721.000	0,08
4	1	6	8	Kelurahan Kerjasan	1.026.261.000	1.580.261.000	2.606.522.000	0,15
4	1	6	9	Kelurahan Kajeksan	1.083.495.000	2.128.828.000	3.212.323.000	0,19
4	1	7		Kecamatan Jati	3.556.835.000	898.033.000	4.454.868.000	0,26
4	1	8		Kecamatan Undaan	3.181.142.000	1.017.380.000	4.198.522.000	0,25
4	1	9		Kecamatan Mejobo	3.428.228.000	1.025.100.000	4.453.328.000	0,26
4	1	10		Kecamatan Jekulo	2.962.493.000	1.145.986.000	4.108.479.000	0,24
4	1	11		Kecamatan Bae	3.235.004.000	892.728.000	4.127.732.000	0,24
4	1	12		Kecamatan Gebog	2.885.905.000	1.149.294.000	4.035.199.000	0,24
4	1	13		Kecamatan Dawe	3.474.322.000	1.090.125.000	4.564.447.000	0,27

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	%
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Pengawasan</b>	<b>5.882.032.000</b>	<b>4.177.549.000</b>	<b>10.059.581.000</b>	<b>0,59</b>
4	2	1		Inspektorat Daerah	5.882.032.000	4.177.549.000	10.059.581.000	0,59
<b>4</b>	<b>3</b>			<b>Perencanaan</b>	<b>6.013.252.000</b>	<b>5.181.448.000</b>	<b>11.194.700.000</b>	<b>0,66</b>
4	3	1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.013.252.000	5.181.448.000	11.194.700.000	0,66
<b>4</b>	<b>4</b>			<b>Keuangan</b>	<b>385.699.676.000</b>	<b>6.522.900.000</b>	<b>392.222.576.000</b>	<b>23,01</b>
4	4	1		Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	385.699.676.000	6.522.900.000	392.222.576.000	23,01
<b>4</b>	<b>5</b>			<b>Kepegawaian</b>	<b>27.241.580.000</b>	<b>4.444.909.000</b>	<b>31.686.489.000</b>	<b>1,86</b>
4	5	1		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	27.241.580.000	4.444.909.000	31.686.489.000	1,86
				<b>JUMLAH</b>	<b>1.085.595.576.000</b>	<b>619.032.790.000</b>	<b>1.704.628.366.000</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPPKAD dan Bappelitbangda Kabupaten Kudus Tahun 2018

**Tabel 4.4.**

**4.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga**

**Tabel 4.5.**  
**Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>
1	Belanja Pegawai	715.914.071.000
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	119.235.120.000
5	Belanja Bantuan Sosial	11.203.016.000
6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	13.686.812.000
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	222.556.557.000
8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000

Dalam anggaran belanja pegawai diperhitungkan anggaran tambahan penghasilan pegawai, *accress* 2,5 persen, pemberian gaji ke-13 dan THR sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 715.914.071.000,-.

Belanja hibah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 119.235.120.000,- yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu :

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 64.060.000.000,-
- (2) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 8.092.120.000,-
- (3) Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp. 47.083.000.000,-

Adapun belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 11.203.016.000,- yang terbagi dalam empat kelompok yaitu:

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Rp. 320.736.000,-
- (2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.000.000.000,-
- (3) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat Rp. 6.706.280.000,-
- (4) Bantuan social tidak direncanakan Rp. 3.176.000,-

Besaran plafon hibah dan bantuan sosial kepada penerima secara rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.6.**  
**Alokasi Hibah dan Bansos Kabupaten Kudus Tahun 2019**

URAIAN	TA. 2019
<b>Belanja Hibah</b>	<b>119.235.120.000</b>
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	64.060.000.000
Hibah Pengamanan Pemilu	2.500.000.000
Hibah kepada Kementerian Agama Kabupaten Kudus Untuk Tambahan Kesejahteraan Guru TPQ, Madin dan Diakonia	61.560.000.000
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.092.120.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi	1.231.000.000
Hibah Pembinaan Olah Raga	4.000.000.000
Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus	100.000.000
Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS)	620.000.000
Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus	300.000.000
Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta	1.641.120.000
Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kudus	200.000.000
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	47.083.000.000
Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian	100.000.000
Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	880.000.000
Hibah Rehabilitasi Sarpras Pamsimas	161.000.000
Hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta	20.760.000.000
Hibah kepada Komite Bantuan Kesejahteraan GTT dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta	20.952.000.000
Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	1.230.000.000
Hibah Bantuan Modal Usaha kepada Wira Usaha	3.000.000.000
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>11.203.016.000</b>
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	320.736.000
Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA)	75.000.000
Bantuan Untuk Kegiatan Panti-Panti Sosial	245.736.000
Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000
Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu	1.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	6.706.280.000
Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu	983.280.000
Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	3.000.000.000
Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHC 45	37.000.000
Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi	186.000.000
Bantuan kepada Khotib dan Imam Masjid/Musholla	2.500.000.000
Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	3.176.000.000
Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	3.176.000.000

**BAB V**  
**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>31.911.070.000</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	31.911.070.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-
1.7	Penerimaan dana talangan dari Provinsi	-
1.8	Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP	-
	<b>Jumlah penerimaan pembiayaan</b>	<b>31.911.070.000</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.500.000.000</b>
2.1	Pembentukan dana cadangan	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	4.500.000.000
2.3	Pembayaran pokok hutang	-
2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
2.5	Pemberian dana talangan kepada LUEP	-
2.6	Pembayaran atas penerimaan dana talangan kepada Provinsi	-
	<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>	<b>4.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan netto</b>	<b>27.411.070.000</b>

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diprediksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.31.911.070.000,-. Adapun prediksi pengeluaran pembiayaan besarnya mencapai Rp. 4.500.000.000,- untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.500.000.000,-, dan PDAM sebesar Rp.4.000.000.000,-. Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah nihil.

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Kudus, 5 November 2018

**BUPATI KUDUS**

**Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT**